

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah diterapkan mengenai kebijakan keimigrasian Turki dalam menangani imigran yang berasal dari Timur Tengah melalui pembangunan *border wall* atau tembok perbatasan di Suriah dan Iran, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan perspektif konsep kepentingan nasional, migrasi internasional, dan teori sekuritisasi, implementasi kebijakan yang diterapkan Turki merupakan sebuah bentuk hasil instrumen kebijakan keamanan yang diakumulasi dari adanya berbagai peristiwa transnasional di wilayah perbatasan, meliputi ketiga negara yang terlibat yaitu Turki, Suriah, Iran, arus pengungsi yang masif, dan dianggap membahayakan kedaulatan nasional Turki sebagai sebuah negara dengan letak geografis strategis di antara benua Asia dan Eropa serta memegang status sebagai salah satu negara yang menampung jumlah pengungsi terbanyak di dunia. Dengan konstruktivisme sebagai ide dasar terdapat penekanan akan aspek identitas, norma, gagasan, dan interaksi sosial, kepentingan nasional merupakan sesuatu yang sejatinya tidak hanya berlandaskan atas kebutuhan material semata dalam perumusan kebijakan tembok perbatasan Turki.

Melihat ke latar belakang dari dibutuhkannya kebijakan tembok perbatasan, terdapat signifikansi dari faktor pengungsi yang berasal dari Suriah dan Iran. Dinamika negara-negara di Timur Tengah yang lekat akan instabilitas kawasan, terutama terkait situasi domestik di negara seperti Suriah dan Iran dengan ketahanan rezim serta demonstrasi politik yang terjadi. Komponen tersebut kemudian memunculkan keinginan untuk bermigrasi yang didasari oleh berbagai faktor seperti ketidakstabilan situasi politik di Suriah akibat keberlangsungan rezim Assad, demonstrasi politik dan peraturan yang menindas warga negara Iran, dan situasi perekonomian kedua negara. Berangkat dari titik tersebut kemudian muncul sebuah fenomena yang dinamakan krisis migrasi. Jutaan pengungsi Suriah dan Iran dengan disertai pengiringan dalam konflik Taliban di Afghanistan membawa jumlah pengungsi yang masuk ke Turki dalam jumlah yang masif. Pengungsi dengan jumlah

sekitar 2,6 juta pada awal tahun 2016 dan mencapai sekitar 2,9 juta pada akhir tahun 2024, disertai dengan pengungsi dari Iran & Afghanistan yang memegang status proteksi internasional dalam rentang jumlah 200 ribu hingga hampir 400 ribu periode 2016-2024. Krisis ini membawa gejolak dalam penanganan pengungsi dan potensi percampuran imigran dan kelompok organisasi teroris yang diakui oleh Turki mengancam stabilitas nasional mereka, mulai dari YPG, PYD, dan PKK.

Di sisi lain, berbagai cara dilakukan oleh Turki dengan meluncurkan operasi militer lintas batas di perbatasan Suriah, mulai dari operasi *euphrates shield*, operasi *olive branch*, operasi *peace spring*, operasi *spring shield*, operasi *winter eagle*, dan operasi *claw-sword*. Sedangkan di Iran terdapat berbagai macam upaya penangkapan teroris dengan pemboman bersenjata kepada otoritas Kurdi disertai *Astana Process* yang kemudian berlanjut kepada pertemuan konferensi tingkat tinggi trilateral antara Moscow, Ankara, dan Tehran dalam mengatasi masalah di Suriah. Dalam konteks kepentingan nasional Turki, keterlibatan terkait gagasan masyarakat, negara, dan bagaimana suatu kebijakan beroperasi sebagai hasil dari produk akhir merupakan akumulasi dari ditetapkannya kebijakan *border wall* Turki di perbatasan Suriah dan Iran. Dari sisi gagasan masyarakat yaitu bagaimana warga negara Turki memiliki sentimen negatif dan kerap menentang keberadaan pengungsi yang mengancam keberlangsungan kehidupan di segi sosial dan ekonomi. Dari sisi negara, walaupun Erdogan memiliki klaim penanganan pengungsi sebagai suatu cara Turki untuk menunjukkan citra mereka ke dunia internasional, kedekatan dengan Uni Eropa dan perjanjian yang hadir seperti mekanisme 1:1, readmisi, dan *Emergency Social Safety Net* (ESSN) juga menjadi faktor yang mendukung kepentingan nasional Turki untuk memperketat perbatasan dengan langkah militerisasi.

Adapun dalam menjelaskan proses sekuritisasi dari diprakarsainya kebijakan *border wall* secara keseluruhan terletak pada empat komponen penting yang mendukung isu untuk dilihat dan diakui sebagai suatu ancaman yang signifikan. Dengan dimulai dari objek referensi berupa perbatasan Turki-Suriah yang membentang sepanjang lebih dari 900 km dan perbatasan Turki-Iran yang membentang sepanjang lebih dari 200 km, berlanjut kepada diterimanya ancaman oleh Turki dari berbagai komponen yang meliputi arus migrasi masif, ancaman

kelompok teroris (PKK, YPG, PYD) dan militan Kurdi. Walaupun ancaman sudah diterima proses sekuritisasi belum benar-benar terjadi tanpa adanya pengakuan dari target audiens yaitu warga negara Turki dan partai politik yang memiliki kepentingan dalam menentukan stabilitas domestik Turki. Dengan dilakukannya berbagai deklarasi dalam bentuk pidato, pernyataan, maupun *press release* oleh Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan Turki. Pada akhirnya proses sekuritisasi ini bertujuan dalam memperkuat legitimasi dari implementasi kebijakan keamanan *border wall* dengan kontrol migrasi yang lebih ketat dari *open-door policy* sebelumnya di wilayah perbatasan Turki-Suriah dan Turki-Iran.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pembangunan *border wall* di perbatasan Turki-Suriah dan Turki-Iran memiliki latar belakang signifikansi yang sama, yaitu menekan arus imigran yang masif dari Timur Tengah, melindungi stabilitas kawasan, dan mencegah perkembangan serta eksistensi dari kelompok militan Kurdi & organisasi teroris. Adapun dalam implementasi kebijakan tembok perbatasan terkait, terdapat beberapa perbedaan dari segi topografi, panjang tembok perbatasan, dan tingkat ancaman yang ada. Dalam konteks perbatasan Turki-Suriah, topografi di sekitar wilayah tersebut didominasi oleh dataran rendah sehingga memudahkan mobilisasi, sedangkan perbatasan Turki-Iran didominasi oleh wilayah pegunungan berundak berujung kepada kesulitan dalam akses mobilisasi. Panjang tembok perbatasan juga mencapai lebih dari 900 km, sebuah angka yang signifikan jika dibandingkan dengan tembok perbatasan Turki-Iran yang hanya mencapai lebih dari 200 km. Dari segi ancaman, perbatasan Turki-Suriah dinilai lebih berbahaya dikarenakan eksistensi dari organisasi seperti YPG, PKK, PYD, dan DAESH yang memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut. Berbeda halnya dengan wilayah sekitar perbatasan Turki-Iran yang hanya menjadi jalur transit para imigran dari berbagai negara di Timur Tengah, terutama Afghanistan. Selain itu, faktor hubungan diplomatik dan kerja sama antara Ankara dan Tehran turut mendukung pengelolaan potensi ancaman di perbatasan Turki-Iran lebih mudah dikelola.

6.2. Saran

Ditandai dengan terselesainya penelitian ini terkait analisis implementasi kebijakan *border wall* Turki di perbatasan Suriah dan Iran dalam periode 2016-2024, pemberian saran praktis dan teoritis diperlukan dengan tujuan memberikan informasi serta rekomendasi kepada berbagai pihak yang relevan sebagai bentuk konsiderasi untuk penelitian di masa mendatang.

6.2.1 Saran Praktis

Dalam aspek praktis dengan memusatkan pada studi terkait dinamika regionalisme di Timur Tengah yang lekat dengan adanya ketidakstabilan konflik antara negara-negara yang ada. Dengan terus berkembangnya zaman, hubungan diplomatik dan kepentingan nasional setiap negara akan cenderung bersifat dinamis, berubah seiring dengan situasi dan kondisi domestik maupun internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di Timur Tengah untuk memperkuat kerja sama regional terutama dalam hal penanganan arus migrasi dan keamanan di wilayah perbatasan agar beban pengelolaan pengungsi tidak menjadi suatu hal yang dapat menimbulkan beban bagi warga negara dan ancaman bagi kedaulatan.

Dari pihak non-negara yang terlibat dalam objek utama dari penelitian ini seperti organisasi non-pemerintah layaknya UNHCR dan IOM serta lembaga kemanusiaan lainnya dapat meningkatkan sistem efektivitas kerja dan distribusi yang merata dalam hal penanganan pengungsi. Jalinan kerja sama dengan negara dan pemerintah setempat turut perlu diperhatikan sebagai bentuk kemudahan dalam menerima dan mengelola akses penyediaan bantuan, fasilitas kesehatan, dan pemulangan pengungsi ke negara asal. Secara garis besar, dengan melihat kebijakan *border wall* sebagai salah satu dari bentuk kebijakan keamanan Turki yang signifikan, pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan dapat mengkaji dari perspektif yang berbeda yaitu publik dan peneliti untuk menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan selanjutnya, baik yang bersifat baru maupun keberlanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan politik terhadap warga negara dan pengungsi.

6.2.2 Saran Teoritis

Melihat dari aspek teoritis, penelitian ini mengkaji bentuk implementasi kebijakan keamanan yang diterapkan oleh Turki di perbatasan Suriah dan Iran dengan menggunakan dasar perspektif kepentingan nasional dan sekuritisasi sebagai proses yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut oleh Administrasi Ankara. Secara garis besar, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dari segi studi lapangan secara langsung dan perolehan informasi dari pemangku kepentingan di Turki yang terlibat, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri, yang bisa dilakukan oleh penelitian selanjutnya ke wilayah perbatasan Turki dengan Suriah dan Turki dengan Iran.

Tidak hanya itu, penelitian di masa mendatang dapat mengambil celah dengan mengedepankan dan mengkaji strategi keamanan yang diambil oleh Turki melalui kacamata realisme, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan konstruktivisme sebagai kacamata utama. Perluasan terhadap objek yang dikaji turut dapat dianalisis oleh penelitian di masa mendatang dari aspek hubungan diplomatik antara ketiga negara setelah eksistensi kebijakan tembok perbatasan ini ada, keberlanjutan, dan efektivitas dari dibangunnya tembok perbatasan dalam menekan arus pengungsi yang masuk ke Turki dan berasal dari Suriah dan Iran untuk memperkaya perspektif terkait kebijakan keamanan non-tradisional Turki.